



Laporan Kegiatan

# Identifikasi dan Analisis Forum Multi Pihak di Lombok dan Sumba

Pengelolaan Pengetahuan Wilayah Pesisir Rendah Emisi  
di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur



Laporan Kegiatan

# **Identifikasi dan Analisis Forum Multi Pihak di Lombok dan Sumba**

**Pengelolaan Pengetahuan Wilayah Pesisir Rendah Emisi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur**

**Disusun oleh Tim Knowledge Management :**

**Zulhamsyah Imran,  
dan  
M. Arsyad Al Amin,**

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
1. Pendahuluan .....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan.....	5
2. Stuktur Forum Multi Pihak .....	5
3. Hasil dan Pembahasan .....	6
3.1 Identifikasi Stakeholder .....	6
3.2 Keterlibatan Multipihak.....	9
3.3 Konflik Kewenangan .....	10
3.4 Kebutuhan FMP Khusus Rendah Emisi.....	11
3.5 Payung Hukum FMP .....	13
3.6 Kemauan Terlibat, Koordinator FMP dan Frekuensi Pertemuan FMP .....	13
3.7 Keterlibatan Swasta dan NGO dalam FMP.....	15
4. Kesimpulan dan Rekomendasi .....	15

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Sumberdaya Pesisir Rendah Emisi yang dilaksanakan oleh Konsorsium Karbon Biru (BCC) dengan fasilitas dana hibah dari Milenium Challenge Account Indonesia (MCAI) saat ini telah memasuki akhir kegiatan kuartal kedua. Pada tahap pelaksanaan kuartal pertama, yaitu pada Bulan Oktober hingga Desember Tahun 2015 yang lalu Konsorsium Karbon Biru telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang salahsatunya adalah analisis pemangku kepentingan melalui Forum Multi Pihak (FMP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sampai tahap ini, maka dapat dihasilkan suatu kesimpulan pola apa yang paling baik dikembangkan dalam forum multi pihak ke depan. Kesimpulan ini amat krusial karena akan menentukan bagaimana FMP dapat efektif sebagai alat komunikasi antara BCC dengan stakeholder, mengingat FMP sangatlah penting dalam konteks project MCAI.

Ada beberapa alasan mengapa FMP diperlukan dalam pendekatan program pengelolaan pengetahuan pembangunan rendah emisi di wilayah pesisir :

- 1) Salah satu target untuk melakukan langkah-langkah dalam pengelolaan pengetahuan mulai dari pengumpulan sampai replikasi pengetahuan diperlukan stakeholder yang relevan dengan target program yang akan diimplementasikan;
- 2) Program pengelolaan pengetahuan merupakan salah program yang didanai oleh MCAI untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik, khususnya mencapai target penurunan gas rumah kaca mencapai 20% sampai dengan tahun 2025;
- 3) Setiap langkah dalam implementasi program perlu mendapatkan dukungan oleh para *stakeholders* yang relevan;
- 4) Implementasi program pengelolaan pengetahuan sangat memerlukan keputusan-keputusan yang diambil secara bersama-sama dengan para stakeholder yang relevan;
- 5) Peran stakeholder yang terlibat dalam FMP akan sangat membantu pengelola program dalam penyelesaian konflik, khususnya implementasi program pada tingkat desa;
- 6) Perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan dapat dilakukan dengan adanya masukan dari stakeholder yang terlibat dalam FMP;
- 7) Dapat mensinergiskan dan menghilangkan kepentingan sektoral dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang periodik dalam FMP;
- 8) Dapat menjadi ajang tukar-menukar informasi dalam membuat rencana program setiap stakeholder yang terlibat dalam FMP, terutama program dan kegiatan pada lokasi yang sama;
- 9) Dapat menjadi mekanisme *quality assurance* dalam menilai apakah program dan kegiatan sudah mencapai target sebagaimana yang direncanakan.
- 10) Untuk menjamin keberlanjutan program pasca project.

## 1.2 Tujuan

Dalam pertemuan FMP, dimaksudkan untuk melakukan suatu penentuan model forum multipihak yang akan digunakan ke depan. Adapun tujuan umum kegiatan identifikasi FMP yaitu:

- 1) Merumuskan langkah-langkah bersama dalam pengelolaan program dan kegiatan;
- 2) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan kepada target lokasi dan penerima manfaat;
- 3) Membuat keputusan strategis dalam proses perencanaan, implementasi, kontrol dan replikasi program dan kegiatan pengelolaan pengetahuan pembangunan rendah emisi
- 4) Diseminasi program dan kegiatan
- 5) Melakukan transfer dan sharing pengetahuan

## 2. Struktur Forum Multi Pihak

Forum multi pihak (FMP) akan dibentuk pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan desa. Pada masing-masing tingkat akan memiliki materi dan orientasi fokus yang berbeda-beda. Materi utama dan fokus pada masing-masing tingkatan diantaranya:

- 1) **Tingkat Nasional:** pembahasan materi konsep pembangunan rendah emisi di wilayah pesisir, integrasi pembangunan rendah emisi kedalam RZWP3K, integrasi SPRE kedalam dokumen KLHS, Strategi adopsi SPRE kedalam dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir, mendorong keluarnya kebijakan terkait pembangunan rendah emisi di wilayah pesisir;
- 2) **Tingkat Provinsi:** pembahasan materi konsep pembangunan rendah emisi di wilayah pesisir, integrasi pembangunan rendah emisi kedalam RZWP3K, RZWP3K Provinsi, KLHS-SPRE berbasis pulau, IDSD (Infrastruktur Data Spasial Daerah), peningkatan kapasitas aparatur pemerintah tentang SPRE dan GIS, mendorong kebijakan integrasi SPRE kedalam RPJMDES;
- 3) **Tingkat Kabupaten:** pembahasan materi konsep pembangunan rendah emisi di wilayah pesisir, Pemahaman RZWP3K Provinsi, KLHS-SPRE berbasis pulau, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah tentang SPRE dan GIS, integrasi SPRE kedalam RTRWK, mendorong kebijakan integrasi SPRE kedalam RPJMDES dan kabupaten, mendorong pengawasan implementasi RTRW;
- 4) **Tingkat Desa:** sosialisasi konsep pembangunan rendah emisi di wilayah pesisir, penyusunan RPJM Desa, pengelolaan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir berbasis rendah emisi, mendorong peningkatan peran POKMASWAS;

Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang akan terlibat dalam FMP akan berbeda-beda dan sangat tergantung tingkat FMP, relevansi, dan kepentingannya. Beberapa stakeholder yang sejak awal dipandang dapat dilibatkan pada masing-masing tingkatan berdasarkan pandangan awal tim adalah:

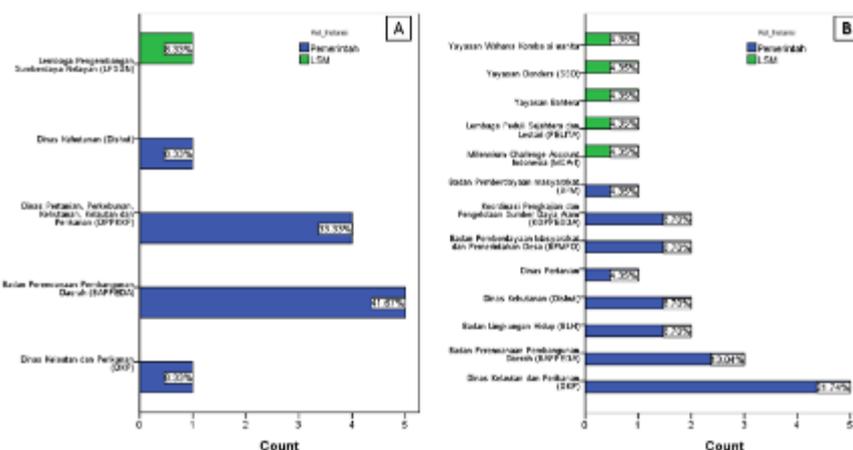
- 1) **Tingkat Nasional:** BAPPENAS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Riset dan Dikti, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, LIPI, Dishidros TNI AL, IPB, LAPAN, BIG, WWF, TNC, Wetland, HNSI, UI, UNJ, UIN Ciputat dll;
- 2) **Tingkat Provinsi NTT:** BAPPEDA, DKP, BLH, DISHUT, BPMD, NGO Lokal, UNDANA, BKKPN;
- 3) **Tingkat Kabupaten :** mengikuti provinsi
- 4) **Tingkat Desa :** Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, LPM, Kelompok masyarakat, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Pemuda.

Pokok-pokok persoalan yang perlu diidentifikasi dan dianalisis kemudian disebarakan sebagai kuisisioner kepada seluruh stakeholder di tingkat Kabupaten dan Provinsi dalam Forum Koordinasi di Pulau Sumba yang dilaksanakan pada 22 Februari 2016 di Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dan di Pulau Lombok yang dilaksanakan 25 Februari 2016 di Mataram. Hasil analisis disajikan pada Bab 3.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Identifikasi Stakeholder

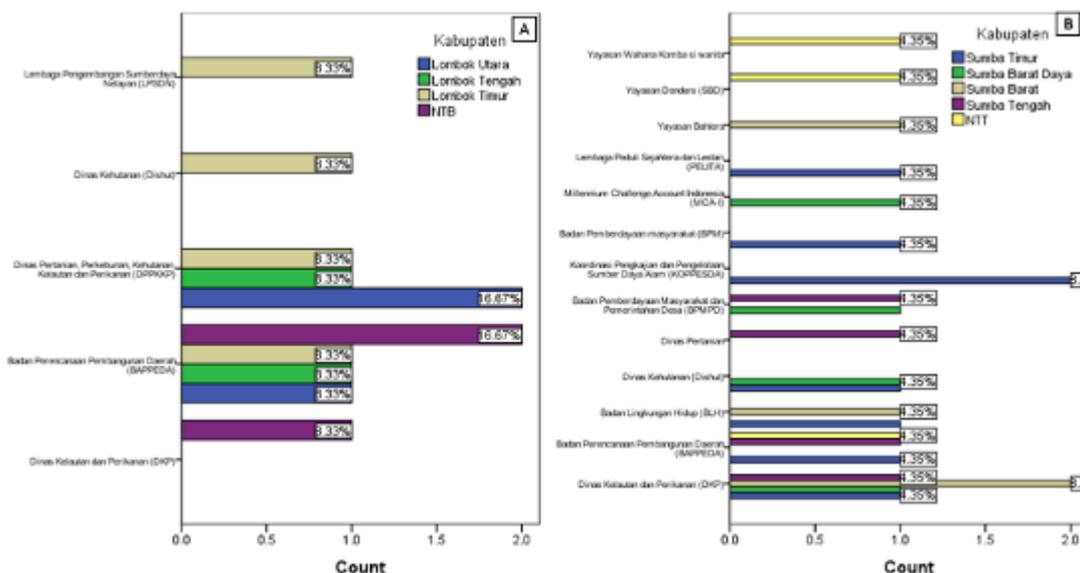
Berdasarkan hasil Forum Koordinasi di Pulau Sumba dan Pulau Lombok pada bulan Februari 2016, *stakeholders* yang hadir dianggap adalah *stakeholders* yang akan terus dilibatkan secara mendalam dalam FMP, terutama dalam perencanaan KLHS-SPRE. Pada kesempatan pertama FMP dihadiri oleh pemangku kepentingan dari instansi pemerintah atau lebih dikenal dengan sebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan non government organization (NGO/LSM). *Stakeholders* yang akan dilibatkan dalam FMP di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 5 lembaga (A) dan 13 lembaga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (B) seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Instansi yang terlibat dalam Forum multi pihak (KLHS-SPRE) di Nusa Tenggara Barat (A) dan Nusa Tenggara Timur (B).

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi lembaga dalam FMP. Di Provinsi NTB, kelembagaan BAPPEDA menempati persentase partisipasi tertinggi keterlibatannya dalam FMP (41,6%), diikuti oleh kelembagaan yang tergolong dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (33,3%). Sebaliknya berbeda Provinsi NTT, yang mana partisipas tertinggi ditunjukkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) (21,7%).

Keragaan lembaga yang berpartisipasi dalam FMP tidak sama untuk setiap kabupaten sasaran baik di Provinsi NTB dan NTT. Unsur kelembagaan yang dominan adalah BAPPEDA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yang terlibat aktif dalam kegiatan FMP. Sedangkan kelembagaan lainnya (lihat Gambar 2) yang mendertiminasi adalah kelembagaan yang berkaitan dengan tugas pokok pengelolaan sumberdaya alam, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Kehutanan. Secara faktual, masih ada beberapa kelembagaan potensial lainnya yang terkait dengan implementasi program BCC, dan potensial untuk dilibatkan dalam FMP, seperti Dinas Pariwisata dan Badan Lingkungan Hidup Daerah. Jika diperhatikan sebaran kelembagaan tersebar, maka hampir seluruh kapupaten target memiliki kelembagaan yang memiliki tugas pokok yang sama, hanya ada beberapa kabupaten dijadikan dalam satu kelompok, misalnya Kabupaten Lombok Timur.



Gambar 2. Sebaran instansi yang terlibat dalam forum multi pihak pada KLHS-SPRE di Pulau Lombok (A) dan Sumba (B).

Berdasarkan hasil koordinasi FMP di kedua pulau tersebut, diketahui bahwa forum yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir telah banyak dikenal dan diterapkan di Pulau Lombok dan Sumba. Forum ini telah dibangun dan difungsikan melalui program dari lembaga-lembaga non pemerintah baik internasional maupun nasional. Beberapa forum yang dikenal sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Forum yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir di Pulau Lombok dan Sumba.

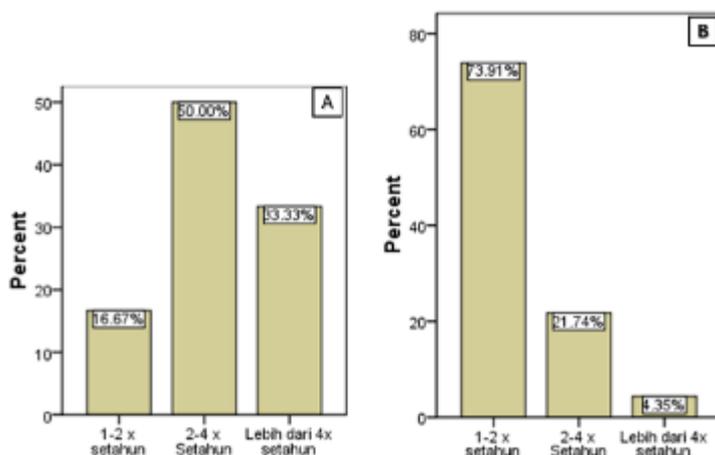
Forum yang sudah ada	
Pulau Lombok	Pulau Sumba
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL)</li> <li>• Mitra bahari</li> <li>• Pokja Pengelolaan Mangrove</li> <li>• Forum kolaboratif pengelolaan Gili Matra</li> <li>• Forum peningkatan konsumsi ikan</li> <li>• Forum/Tim Koordinasi implementasi MCI</li> <li>• Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</li> <li>• Proyek Pengelolaan Pengetahuan Tata Kelola Sumberdaya Pesisir Rendah Emisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Konservasi Sumberdaya Perairan</li> <li>• Konservasi Sumberdaya Hutan</li> <li>• Forum Gerakan Masuk Laut (Gemala)</li> <li>• TNP Laut Sawu</li> <li>• Multi Stakeholder Forum (MCA-I)</li> <li>• Forum RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)</li> <li>• Forum perencanaan pengelolaan wilayah pesisir</li> <li>• Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</li> </ul>

Dapat dipastikan bahwa tidak semua forum yang didirikan berjalan dengan efektif dan efisien (baik). Ada banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam operasional forum yang telah ada, antara lain:

- 1) Kinerja yang belum optimal karena rendahnya SDM sehingga efektifitasnya rendah,
- 2) Kegiatannya tidak berjalan dengan baik jika anggotanya kurang aktif/hilang setelah proyek.

Umumnya frekuensi pertemuan setiap forum yang telah ada sebelumnya sangat rendah. Dengan frekuensi pertemuan dari forum tersebut dominan dilakukan 2-4 kali dalam se-tahun yakni sebesar 50 % di Pulau Lombok dan 1-4 kali dalam se-tahun yakni sebesar 73,9 % di Pulau Sumba. Agar setiap kebijakan dan keputusan dapat berjalan efektif, setidaknya forum koordinasi seperti ini seharusnya melakukan pertemuan 1 kali dalam satu bula.

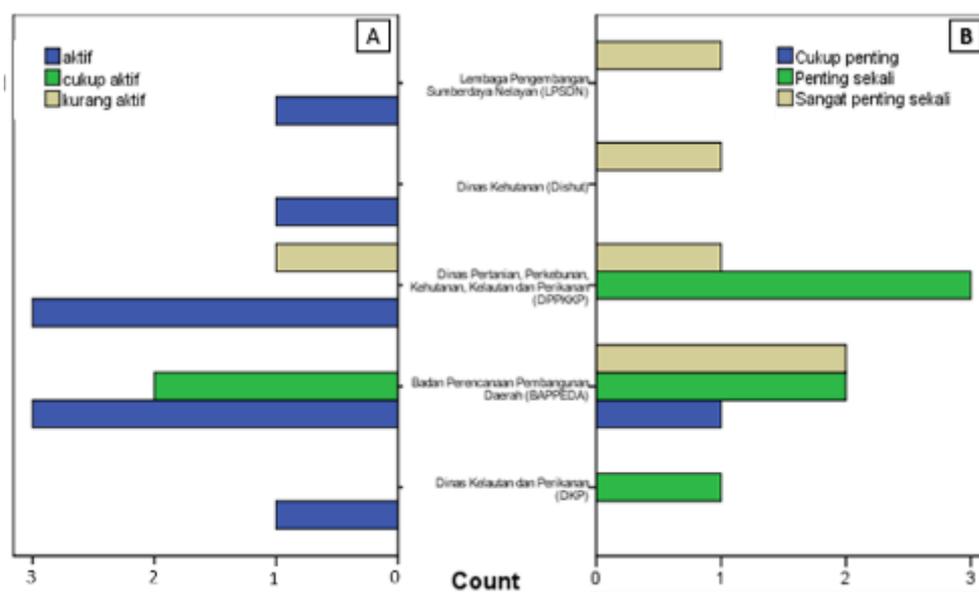
Setiap forum dikoordinasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Namun umumnya lembaga yang menjadi koordinator dalam forum tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Lingkungan Hidup (BLH). Ditemukan juga gejala bahwa hampir semua forum yang telah ada diketua oleh Wakil Bupati dan dikendalikan oleh satu Asisten Pembangunan Daerah (ASDA).



Gambar 3. Frekuensi pertemuan forum yang sudah ada di Pulau Lombok (A) dan Sumba (B).

### 3.2 Keterlibatan Multipihak

Keberhasilan suatu program yang melibatkan *stakeholders* lain juga tergantung kepada pemahaman yang jelas terhadap pentingnya peran instansi dalam program tersebut. Hasil Forum Multi Pihak di Pulau Lombok menunjukkan bahwa 91,7% dari *stakeholders* memiliki peran yang penting dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan 75% dari *stakeholders* terlibat secara aktif. Adapun keterlibatannya antara lain diwujudkan dalam kegiatan: menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan lautan seperti penanaman mangrove, perumusan kebijakan-kebijakan terkait wilayah pesisir dan laut, perencanaan dan penganggaran, pembahasan produk rencana dan pengendalian. Keterlibatan dan pentingnya peran dari *stakeholders* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Pulau Lombok tersebut disajikan pada Gambar 4.

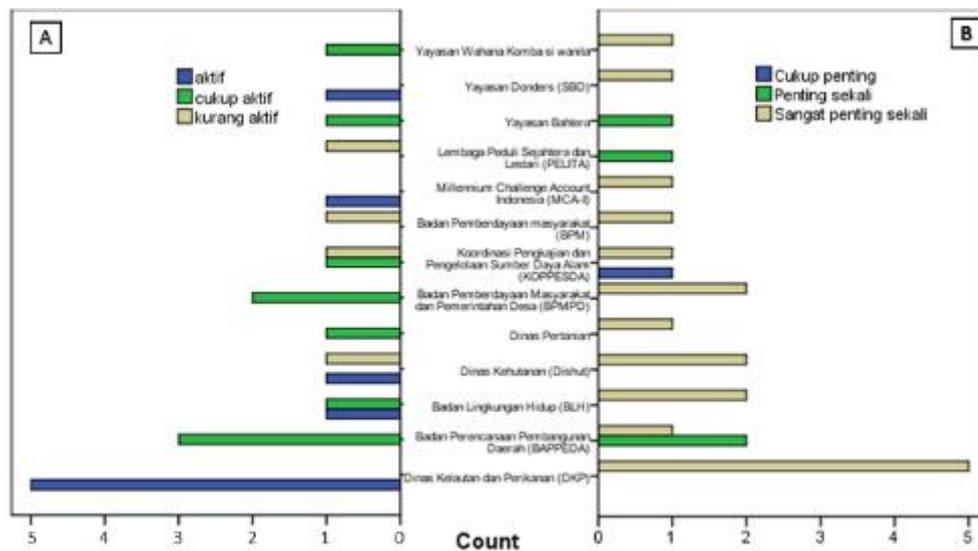


Gambar 4. Tingkat keterlibatan stakeholder (A) dan tingkat kepentingan peran stakeholder (B) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Pulau Lombok-NTB.

Berdasarkan hasil koordinasi FMP di Pulau Lombok diketahui bahwa DKP, DPPKPP, BAPPEDA, DISHUT dan LSSDN terlibat secara aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dengan peran yang penting sekali dari DKP dan DPPKPP serta peran sangat penting sekali dari BAPPEDA dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Pulau Lombok.

Sementara hasil Koordinasi FMP di Pulau Sumba menunjukkan bahwa 95,67 % dari *stakeholders* memiliki persepsi bahwa peran mereka penting dalam pengelolaan pesisir dan laut, sebesar 39,10% dari *stakeholders* yang terlibat secara aktif. Adapun keterlibatannya antara lain diwujudkan dalam bentuk: kegiatan konservasi sumberdaya pesisir dan lautan seperti penanaman mangrove, pengembangan budidaya rumput laut, penertiban pelaku usaha/kegiatan di pesisir; menyusun

RZWP3K; perencanaan (RPJMDes); pengawasan kapasitas kelompok desa pesisir; dan berkoordinasi dengan instansi lain untuk pengelolaan wilayah pesisir. Keterlibatan dan pentingnya peran instansi tersebut disajikan melalui Gambar 5.



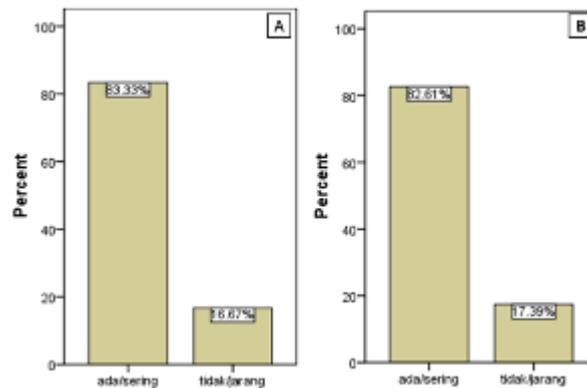
Gambar 5. Keterlibatan (A) dan pentingnya peran (B) instansi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Pulau Sumba-NTT.

Sementara di Pulau Sumba, FMP berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah DKP, BLH, DISHUT dan LSM terlibat secara. Dengan peran yang penting dari DKP, BAPPEDA, DISHUT, Dinas Pertanian, BPMMD serta DKP dan BAPPEDA memiliki yang memiliki peran yang sangat penting sekali dalam kebijakan tersebut di Pulau Sumba.

Walaupun demikian instansi lain dan LSM juga memiliki kepedulian terhadap kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta mempunyai maksud yang sungguh-sungguh dalam program walaupun tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau membuat peraturan-peraturan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya konflik kewenangan.

### 3.3 Konflik Kewenangan

Potensi konflik terindikasi terhadap penggunaan ruang pesisir dan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Di Pulau Lombok, sekitar 83% dari *stakeholders* mengakui hal tersebut sedangkan di Pulau Sumba sebesar 82,61% dari *stakeholders* juga merasakan hal yang sama terhadap adanya potensi konflik ruang pesisir dan kepentingan dalam mengelola wilayah pesisir. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Pulau Lombok dan Sumba masih tinggi.



Gambar 6. Persepsi stakeholder tentang ada atau tidak adanya konflik penggunaan ruang dan kewenangan di Pulau Lombok (A) dan Sumba (B).

Berdasarkan alasan yang dikemukakan *stakeholders* di Pulau Sumba, adanya konflik disebabkan karena:

- 1) Konflik penggunaan lahan seperti jual beli lahan, sertifikat lahan oleh BPN, serta pemanfaatan lahan pesisir untuk perikanan (usaha garam ) dan pariwisata,
- 2) Konflik antar masyarakat dengan pemilik hak ulayat,
- 3) Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom dan potasium.

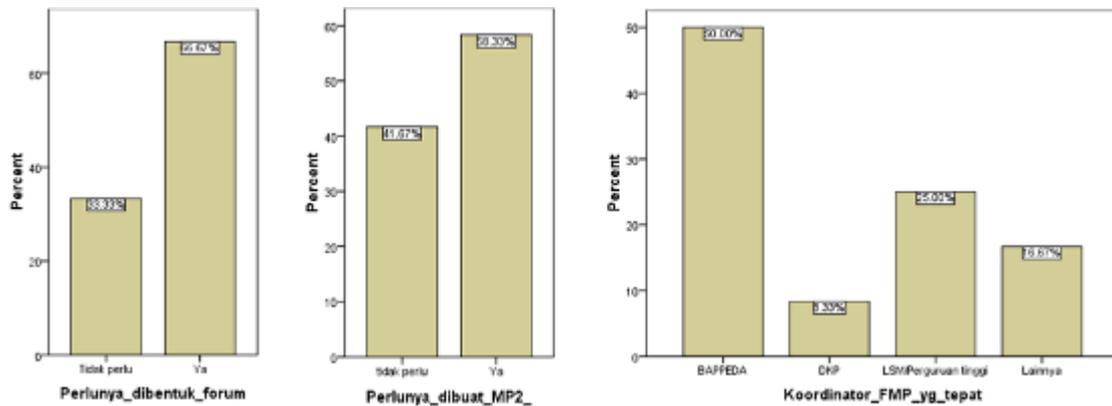
Sedangkan di Pulau Lombok, tingginya konflik yang terjadi secara umum disebabkan karena:

- 1) Pemanfaatan ruang darat dan laut,
- 2) Konflik pengelolaan antar sektor pariwisata dan pertambangan,
- 3) Ketiksesuaian antara rencana tata ruang dengan implementasi kegiatan,
- 4) Perubahan lahan kawasan hutan lindung menjadi jalan desa dan kampung. Oleh karena itu peran stakeholder yang terlibat dalam FMP akan sangat membantu pengelolaan program dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

### 3.4 Kebutuhan FMP Khusus Rendah Emisi

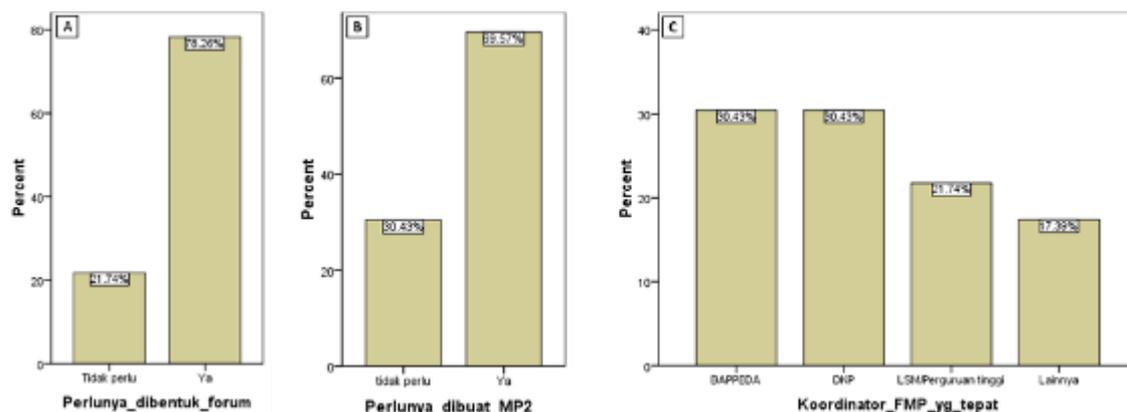
FMP yang merupakan forum koordinasi *stakeholders* yang secara khusus membahas isu pembangunan rendah emisi diharapkan dapat mensinergiskan kerja antar *stakeholders* dan dapat menghilangkan kepentingan sektoral melalui proses komunikasi dan koordinasi secara periodik. Hasil analisis menunjukkan hasil yang berbeda di kedua pulau. Di Pulau Lombok diketahui bahwa 66,67 % dari *stakeholders* menyatakan pendapat perlunya dibentuk FMP khusus yang menangani isu pembangunan rendah emisi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan dari stakeholder dalam program Pengelolaan Pengetahuan Tata Kelola Sumberdaya Pesisir Rendah Emisi di Nusa Tenggara Barat. Agar adanya komunikasi dan koordinasi yang baik pada FMP khusus tersebut, maka sekitar 58,33% dari *stakeholders* menyarankan perlu dibuat FMP level pimpinan dan level pelaksana. Disarankan juga agar BAPPEDA adalah lembaga yang tepat untuk dijadikan sebagai

koordinator (50%), karena memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan di Nusa Tenggara Barat (Gambar 7).



Gambar 7. Persentase kebutuhan stakeholder tentang perlunya di bentuk FMP khusus yang menangani isu PRE (A) perlunya dibuat FMP level pimpinan dan level pelaksana (B) dan koordinator/leader yang paling tepat (C) di Pulau Lombok.

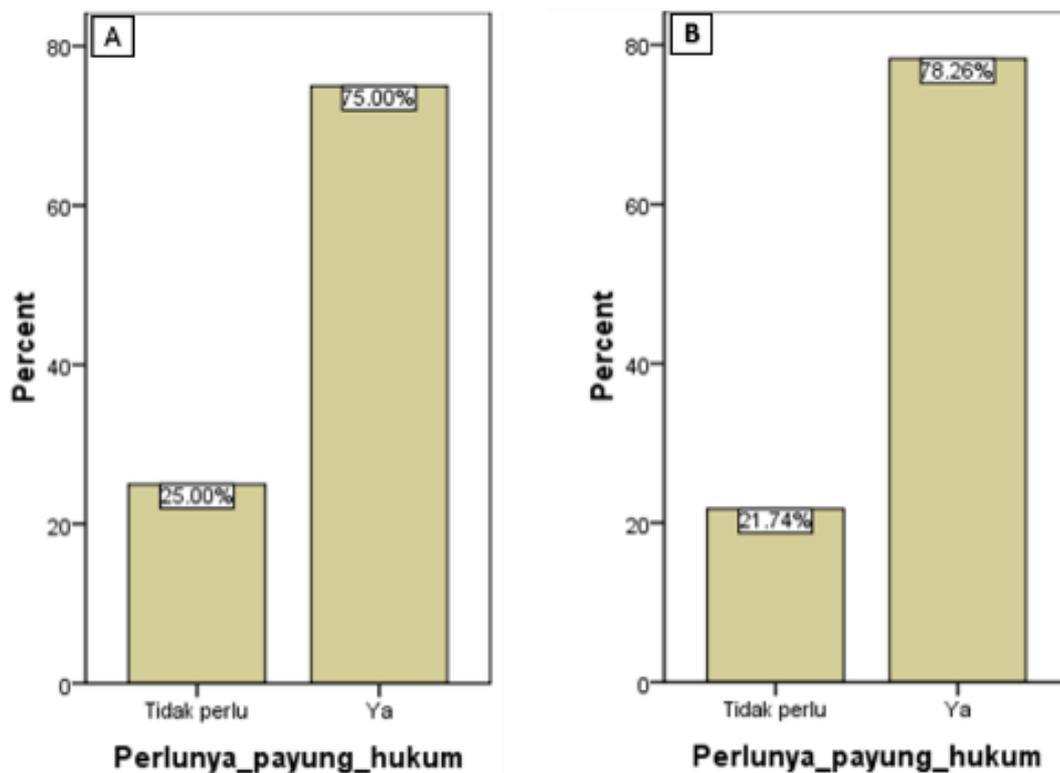
Sementara di Pulau Sumba menunjukkan bahwa 78,26% dari *stakeholders* menyatakan perlu dibentuk FMP khusus yang menangani isu pembangunan rendah emisi. Hal ini juga menunjukan bahwa adanya dukungan dari *stakeholders* dalam program Pengelolaan Pengetahuan Tata Kelola Sumberdaya Pesisir Rendah Emisi di Nusa Tenggara Timur. Agar adanya komunikasi dan koordinasi yang baik pada FMP khusus tersebut, sebesar 69,57% dari *stakeholders* menyatakan juga perlu di buat FMP level pimpinan dan level pelaksana. Dengan koordinator yang dianggap paling tepat adalah BAPPEDA dan DKP yakni masing-masing sebesar 30,43 %, karena memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan di Nusa Tenggara Timur.



Gambar 8. Persentase kebutuhan stakeholder tentang perlunya di bentuk FMP khusus yang menangani isu SPRE (A) perlunya dibuat FMP level pimpinan dan level pelaksana (B) dan koordinator/leader yang paling tepat (C) di Pulau Lombok.

### 3.5 Payung Hukum FMP

Payung hukum dibutuhkan untuk memberikan landasan dan penguatan FMP yang FMP pembangunan rendah emisi. Hasil analisis sangat mendukung perlu adanya patung hokum, sekitar 75 % dari stakeholders di Pulau Lombok dan 75 % di Pulau Sumba menyatakan perlu adanya payung hukum (surat keputusan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten) untuk FMP pembangunan rendah emisi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legalitas merupakan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan merupakan prasyarat untuk keberhasilan program dari FMP khusus tersebut.

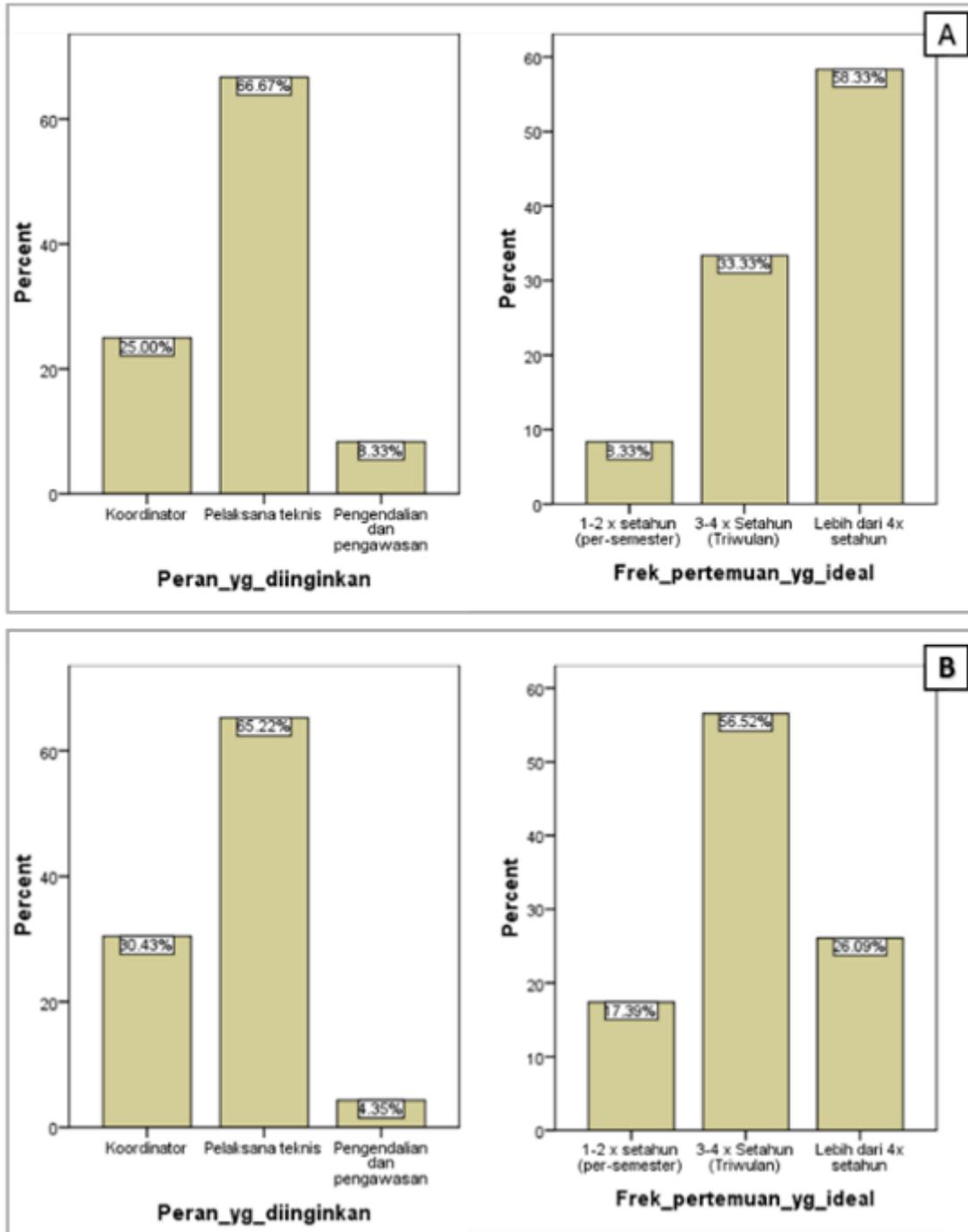


Gambar 9. Presentase pendapat stakeholder tentang perlu tidaknya payung hukum untuk koordinasi FMP rendah emisi di Pulau Lombok (A) dan Sumba (B).

### 3.6 Kemauan Terlibat, Koordinator FMP dan Frekuensi Pertemuan FMP

Secara ideal FMP dipandang dapat menjadi ajang tukar-menukar informasi dalam membuat rencana program setiap stakeholder sesuai dengan peran dan keterlibatannya dalam FMP, terutama program dan kegiatan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pendapat para stakeholder hasil FMP, di Pulau Lombok diketahui bahwa stakeholder yang ingin terlibat dalam FMP sebagai koordinator sebanyak 25 % dan pelaksana teknis sebanyak 66,67 % serta pengawas sebanyak 8,33 % dengan frekuensi pertemuan yang ideal adalah lebih dari 4x dalam se-tahun (dipilih oleh 58,33 % stakeholder). Sedangkan di Pulau Sumba diketahui

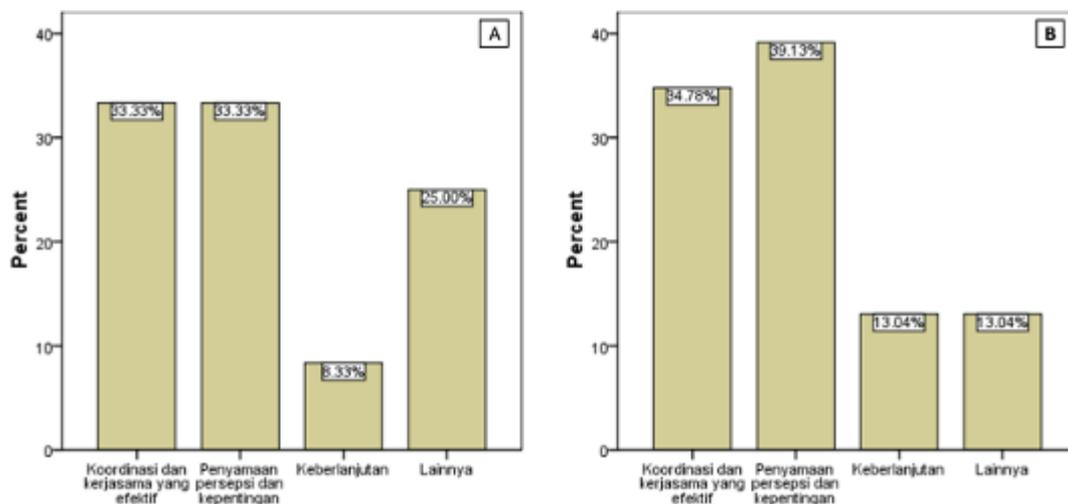
bahwa stakeholder yang ingin terlibat dalam FMP sebagai koordinator sebanyak 8,33 % dan sebagai pelaksana teknis sebanyak 66,67 % dan pengawas sebanyak 8,33 %. Frekuensi pertemuan yang ideal menurut stakeholder adalah lebih dari 3-4x dalam se-tahun, dimana sebanyak 58,33 %, stakeholder berpendapat demikian. Hasil lengkap komposisi pendapat stakeholder seperti yang disajikan dalam Gambar 10.



Gambar 10. Persentasi peran yang diinginkan oleh stakeholder dan frekuensi pertemuan forum yang dianggap ideal oleh stakeholder di Pulau Lombok (A) dan Sumba (B).

### 3.7 Keterlibatan Swasta dan NGO dalam FMP

Implementasi program pengelolaan pengetahuan sangat memerlukan keputusan-keputusan yang diambil secara bersama-sama dengan para stakeholder yang relevan. Hasil analisis membuktikan bahwa perlu ada pelibatan pihak lain di luar pemerintah seperti: swasta, LSM, perguruan tinggi, pers, masyarakat adat, maka tantangan terbesar yang dihadapi stakeholder di Pulau Lombok adalah koordinasi dan kerjasama yang efektif serta penyamaan persepsi dan kepentingan yakni sebesar 33,33 %. Sedangkan di Pulau Sumba tantangan terbesar yang dihadapi stakeholder adalah penyamaan persepsi dan kepentingan yakni sebesar 39,13 % seperti yang disajikan dalam Gambar 11.



Gambar 11. Persepsi tentang tantangan yang akan muncul apabila forum melibatkan pihak lain di Pulau Lombok (A) dan Sumba (B).

Berdasarkan hal di atas, meskipun *stakeholders* umumnya setuju, namun perlu memperhatikan tantangan yang mungkin timbul. Jika ke depan perlu pelibatan *stakeholders* baru, maka harus dibuatkan mekanisme dan panduan forum multipihak agar jelas hubungan antar *stakeholders* di berbagai tingkatan dalam menjalankan fungsinya.

## 4. Kesimpulan dan Rekomendasi

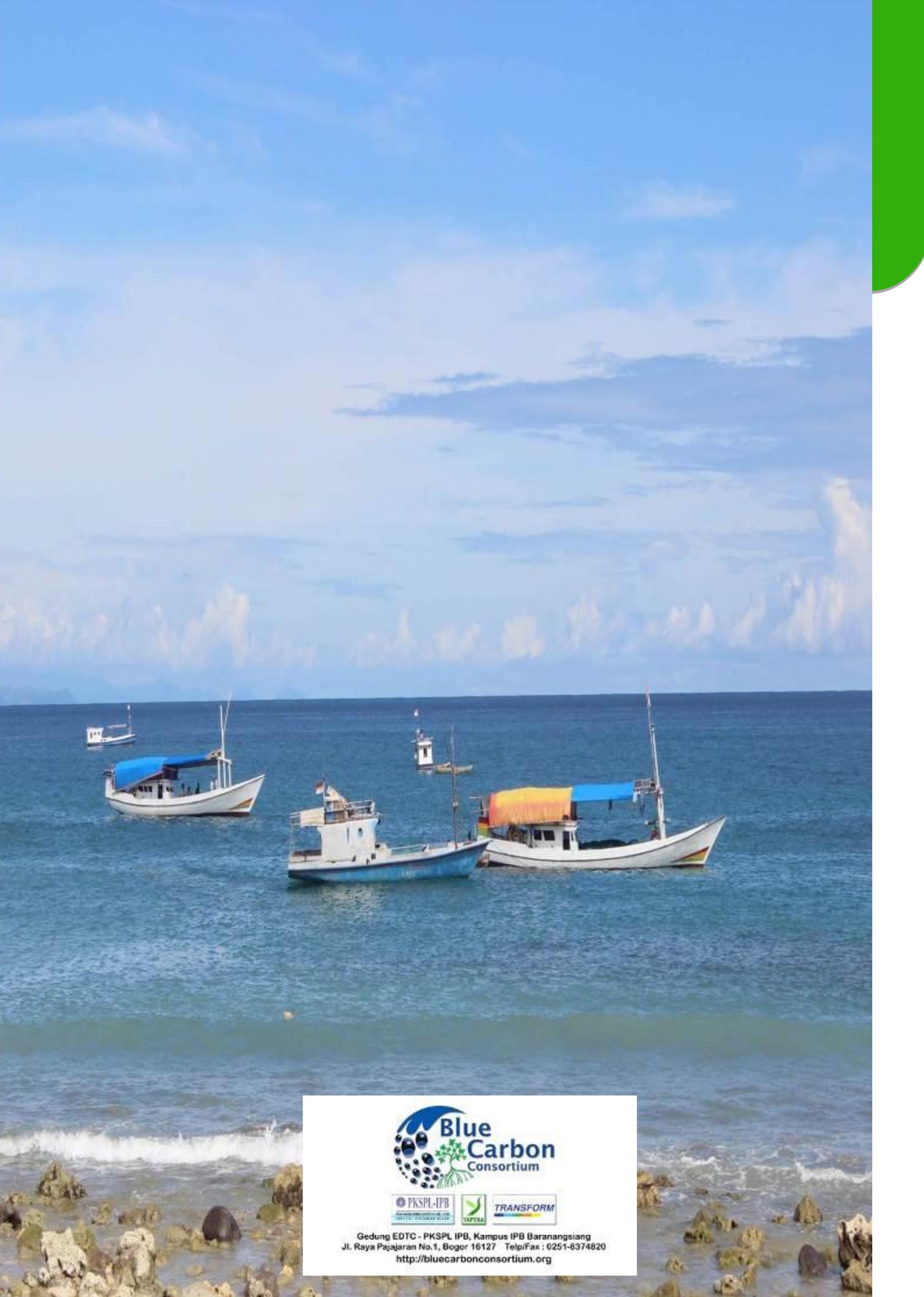
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil koordinasi multipihak di Pulau Lombok dan Sumba, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Jumlah jenis *stakeholders* yang ikut aktif dalam koordinasi di Pulau Lombok terdiri dari 5 (lima) jenis lembaga, sedangkan di Pulau Sumba berjumlah 13 jenis. Dimana yang persepsi keterlibatannya paling tinggi dalam FMP adalah Bappeda di Pulau Lombok dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

- 2) Baik di Pulau Lombok ataupun di Pulau Sumba, keberadaan forum-forum koordinasi yang bersifat multipihak sudah cukup banyak. Namun umumnya kurang berjalan efektif dan anggotanya kurang aktif/hilang setelah proyek.
- 3) Di Pulau Lombok diketahui bahwa Bappeda adalah pihak yang paling aktif dalam program pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Sedangkan di Sumba DKP memiliki peran yang paling penting dalam kebijakan tersebut. Walaupun demikian instansi lain dan NGO juga memiliki kepedulian terhadap kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan mempunyai maksud yang sungguh-sungguh dalam program meskipun tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau membuat peraturan-peraturan.
- 4) Ditemukan adanya konflik penggunaan ruang pesisir dan konflik kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan baik di Pulau Lombok (83 % mengakui) dan di Pulau Sumba (82,61 % mengakui),
- 5) Di Pulau Sumba, konflik lahan berupa: jual beli lahan pesisir oleh pihak luar, konflik sertifikat lahan oleh BPN, serta pemanfaatan lahan pesisir untuk perikanan (usaha garam ) dan pariwisata, konflik antar masyarakat dengan pemilik hak ulayat, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom dan potasium. Sedangkan di Pulau Sumba konflik berupa: pemanfaatan ruang darat dan laut, konflik pengelolaan antar sektor pariwisata dan pertambangan, ketikesesuaian antara rencana tata ruang dengan implementasi kegiatan, serta perubahan lahan kawasan hutan lindung menjadi jalan desa dan kampung.
- 6) Adanya Forum multipihak khusus yang menangani isu rendah emisi, disepakati oleh para stakeholder di Pulau Lombok dan Sumba. Di kedua pulau juga para stakeholder sepakat perlunya dibuat FMP pada dua level yaitu level pimpinan dan level pelaksana.

Beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh program BCC adalah:

- 1) Pihak yang dipandang sesuai untuk mengkoordinir FMP yang tepat di Pulau Lombok adalah Bappeda, karena memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan, sedangkan di Pulau Sumba koordinator yang dianggap sesuai dapat dari Bappeda ataupun DKP.
- 2) Sebagian besar stakeholder di kedua pulau juga menyatakan perlu adanya payung hukum (surat keputusan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten) untuk FMP pembangunan rendah emisi.
- 3) Frekuensi pertemuan ideal FMP yang diinginkan stakeholder adalah 3-4 kali dalam setahun.
- 4) Jika FMP melibatkan pihak lain di luar pemerintah seperti: swasta, LSM, perguruan tinggi, pers, dan masyarakat adat, maka tantangan terbesar yang dihadapi stakeholder di Pulau Lombok adalah koordinasi dan kerjasama yang efektif serta penyamaan persepsi dan kepentingan. Sedangkan di Pulau Sumba tantangan terbesar yang dihadapi stakeholder adalah penyamaan persepsi dan kepentingan.



Gedung EDTC - PKSP-IPB, Kampus IPB Baranangsiang  
Jl. Raya Pajajaran No.1, Bogor 16127 Telp/Fax : 0251-8374820  
<http://bluecarbonconsortium.org>